

MEMBANGUN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

Bonti^{1*}, Herijanto Bekti², Sawitri
Budi Utami³, Tomi Setiawan⁴,
, Ramadhan Pancasilawan⁵,
Hilman Abdul Halim⁶.

^{1,2,3,4,5,6}Administrasi Publik FISIP
Unpad

Article history

Received : 29-11-2023

Revised : 15-10-2024

Accepted : 17-01-2024

Published : 17-01-2024

*Corresponding author

Email : bonti@unpad.ac.id

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v5i1.51344>

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di daerah Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kab Bandung Barat) pada bulan Agustus 2023 mengalami kondisi darurat. Hal ini ditandai dengan *overload* yang dialami Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sudah tidak sanggup lagi menampung pembuangan sampah, terutama sampah yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Berdasarkan hal tersebut maka tim PPM merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam menjadi bagian dalam solusi mengatasi sampah dari huluunya. Tim PPM memutuskan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah pada level Desa di wilayah Kab. Bandung. Adapun desa yang Tim PPM pilih untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah Desa Cileunyi Kulon, yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Metode kajian dan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam kegiatan PPM pada tahap ke-1 ini adalah dengan melakukan kegiatan FGD, pendampingan penyusunan *roadmap* dan rencana aksi pengelolaan sampah Desa. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya terbukanya komunikasi dan transparansi informasi terkait permasalahan di wilayah masing-masing peserta, serta terbentuknya komitmen untuk menyusun rencana aksi lebih lanjut untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon.

Kata kunci: *collaborative governance*, pengelolaan sampah, desa.

ABSTRACT

Waste management in the Greater Bandung area (Bandung City, Bandung Regency and West Bandung Regency) will experience an emergency in August 2023. This is characterized by the overload experienced by the final waste disposal site (TPA) which is no longer able to accommodate waste disposal, especially waste originating from the Greater Bandung area. Based on this, the PPM team feels called to contribute to being part of the solution to dealing with waste from upstream. So the PPM Team decided to contribute to waste management at the village level in the district area. Bandung. The village that the PPM Team chose to carry out community service is Cileunyi Kulon Village, which is located in Cileunyi District, Bandung Regency, West Java Province. The method of study and community service used in PPM activities at stage 1 is by carrying out FGD activities, assisting in the preparation of roadmaps and action plans for village waste management. The result of this activity is the formation of open communication and transparency of information regarding problems in each participant's area, as well as the formation of a commitment to develop further action plans to improve waste management governance in Cileunyi Kulon Village.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Village.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk pelayan publik yang sangat penting. Sampah merupakan produk residual dari masyarakat yang tidak bisa dihindari. Pengelolaan sampah yang tidak mampu mengimbangi laju produksi sampah masyarakat yang semakin meningkat akan meningkatkan resiko gangguan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah di daerah Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kab Bandung Barat) pada bulan Agustus 2023 mengalami kondisi darurat. Hal ini ditandai dengan *overload* yang dialami Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sudah tidak sanggup lagi menampung pembuangan sampah. *Overload* yang terjadi di TPA Sarimukti telah sebesar 800% dari kapasitas yang seharusnya (Pamungkas, 2023). Dengan kondisi tersebut TPA Sarimukti sudah tidak bisa lagi menampung sampah dengan total penerimaan sampah sebesar 2000 ton perhari (Pamungkas, 2023). Hal tersebut menyebabkan TPA Sarimukti sudah tidak layak lagi menjadi TPA dikarenakan kondisi *overload* dan peristiwa kebakaran tumpukan sampah yang terjadi pada tahun 2023.

Sumber sampah tersebut berasal dari kawasan Bandung Raya, terutama sampah yang berasal dari kawasan Kota Bandung, dimana 95% Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Bandung telah mengalami *overload* (Pamungkas, 2023) (Ripaldi, 2023). Dengan kondisi yang *overload* tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kawasan Bandung Raya sebagai kawasan dengan status darurat sampah.

Status darurat sampah Bandung Raya ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan berakhir pada 25 September 2023. Namun ternyata Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan memperpanjang status tersebut hingga 25 Oktober 2023 dikarenakan belum tuntasnya penanganan *overload* sampah dan penanganan kebakaran sampah di TPA Sarimukti (Bandung, 2023) (Ripaldi, 2023). Berdasarkan status tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menekankan komitmen kepada Kepala

Daerah di wilayah Badung Raya untuk mengelola sampah dari hulunya (Bandung, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan sampah pada hulu produksi sampah menjadi sangat strategis. Keberhasilan pengelolaan sampah pada hulu produksi sampah akan membantu mengurangi produksi sampah yang akan dibuang di TPA. Pengurangan produksi sampah ini akan dapat menghindarkan kawasan Bandung Raya dari kondisi darurat sampah seperti yang terjadi pada kurun waktu 24 Agustus hingga 25 oktober 2023 (Bandung, 2023).

Berdasarkan hal tersebut maka tim PPM merasa terpanggil untuk berkontribusi menjadi bagian dalam solusi mengatasi sampah dari hulunya. Maka Tim PPM memutuskan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah pada level Desa di wilayah Kab. Bandung. Adapun desa yang Tim PPM pilih untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah Desa Cileunyi Kulon, yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa Cileunyi Kulon Tim PPM pilih sebagai tempat dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah dikarenakan berdasarkan observasi awal Tim PPM ke lapangan, didapatkan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Cileunyi Kulon dalam pengelolaan sampah dari hulunya. Dasar pemilihan Desa Cileunyi Kulon sebagai lokasi PPM adalah dikarenakan lokasi geografis yang dekat dengan Kampus Universitas Padjadjaran, sehingga Tim PPM berharap PPM yang dilaksanakan ini dapat memberikan sumbangsih bagi Desa-Desa di sekitar Universitas Padjadjaran. Berdasarkan observasi awal yang Tim PPM laksanakan, terdapat beberapa indikasi masalah terkait pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon yang Tim PPM temukan adalah :

1. Masih terlihatnya pembuangan sampah sembarangan dan pembakaran sampah secara sembarangan oleh masyarakat pada beberapa titik, terutama pada tempat-tempat tanah kosong atau kavling-kavling tanah yang belum dibangun.
2. Pembuangan sampah dan Pembakaran sampah sembarangan

masih sering dilakukan oleh masyarakat dikarenakan jadwal pengangkutan sampah yang tidak menentu dikarenakan faktor cuaca, kondisi kendaraan yang rusak ataupun kondisi TPA yang sedang sedang tidak bisa menerima pembuangan sampah. Berdasarkan wawancara Tim PPM dengan warga didapatkan keterangan bahwa truk pengangkut sampah biasanya datang untuk mengangkut sampah tiap 1 minggu sekali. Namun pada kondisi hujan lebat di TPA, serta ketika Truk mengalami kondisi kerusakan, pernah beberapa kali terjadi keterlambatan, sehingga penarikan sampah baru dilaksanakan setelah 2 hingga 3 minggu. Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah, sehingga warga memutuskan untuk melakukan pembakaran sampah. Berdasar hal ini warga berharap pengelolaan sampah mandiri di Desa Cileunyi Kulon akan membantu memberikan solusi pengelolaan sampah, sehingga penumpukan sampah tidak terjadi lagi.

3. Berdasarkan keterangan dari pihak Desa Cileunyi Kulon, Desa Cileunyi Kulon sebenarnya telah memiliki Bumdes Pengelola Sampah. Pengelolaan sampah ini memiliki Bank Sampah pada 24 RW (Rukun Warga) yang tersebar di 8 Dusun di Desa Cileunyi Kulon. Namun berdasarkan keterangan dari Kasi. Pemerintahan Desa Cileunyi Kulon, pada saat ini hanya tersisa 4 Bank Sampah yang masih aktif beroperasi. Berdasarkan hal ini maka Kasi. Pemerintahan Desa Cileunyi Kulon berharap Tim PPM dapat membantu menghidupkan kembali Bumdes Pengelola Sampah tersebut agar pengelolaan sampah dapat tuntas selesai dan tertangani di level Desa.

Berdasarkan indikasi masalah tersebut maka Tim PPM memutuskan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini dengan upaya untuk membangun pengelolaan sampah di Desa

Cileunyi Kulon dengan berbasis pada konsep Collaborative Governance. Diharapkan dengan konsep ini akan menjadi tools rekayasa sosial untuk menumbuhkan dan membangun inklusifitas dan kohesivitas masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri di Desa Cileunyi Kulon.

KAJIAN PUSTAKA

Sampah

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak terpakai, tidak dimanfaatkan, tidak disukai, atau dibuang serta dihasilkan dari kegiatan manusia dan tidak terjadi secara alami. Sampah secara garis besar digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari proses industri dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat didaur ulang. Karena sampah anorganik membutuhkan waktu yang relatif lama untuk proses penguraiannya, maka lama kelamaan sampah tersebut dapat terakumulasi dan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.

Jenis-jenis sampah Menurut Sucipto berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya dibedakan menjadi dua yaitu: 1). Sampah Organik Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Istilah sampah organik basah dimaksudkan sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi seperti kulit buah dan sisa sayuran. Sementara bahan yang termasuk sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil seperti kertas, kayu atau ranting pohon dan dedaunan kering; 2). Sampah Anorganik Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini berasal dari bahan yang bisa diperbaharui dan bahan yang berbahaya serta beracun. Jenis yang termasuk ke dalam kategori bisa didaur ulang (recycle) ini misalnya bahan yang terbuat dari plastik atau logam. Sampah kering non logam (gelas kaca, botol kaca, kain, kayu, dll) dan juga sampah lembut yaitu seperti debu dan abu Aulia et al., (2021).

Permasalahan sampah terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian hilir, proses dan hulu. Bagian hilir terletak pada pembuangan sampah yang terus menerus meningkat. Bagian proses terletak pada keterbatasan sumber daya dalam mengelola sampah, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Bagian hulu terletak pada masih kurang optimalnya sistem yang diterapkan dalam pemrosesan akhir sampah (Mulasari, 2016). Beberapa faktor yang menghambat sistem pengelolaan sampah yang dapat menjadi masalah adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi, dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat (Sahil, 2016).

Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah, diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan membentuk kesadaran untuk memilah sampah. Untuk dapat memilah sampah dengan baik, diperlukan pembentukan perilaku tersebut sejak dini. Karena pada usia tersebut, pembentukan perilaku akan lebih mudah dan hasilnya akan terlihat pada usia berikutnya.

Langkah awal dalam membentuk perilaku pengelolaan sampah yang baik dapat dimulai dengan pengenalan pengetahuan tentang sampah, membentuk kebiasaan memilah dan membuang sampah pada tempatnya, serta mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Dengan dilakukan pembentukan kebiasaan tersebut, diharapkan kebiasaan mengelola sampah dengan baik dapat terus terbawa hingga dewasa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang baik yang bisa dimulai sejak dini (Siagian, 2022).

Pengelolaan sampah secara sederhana bisa dikumpulkan atau dilakukan pada satu tempat sampah yang ada di tiap-tiap rumah, tanpa adanya pembagian tempat sampah secara organik dan anorganik. Setelah dikumpulkan, tidak ada pengelolaan secara lebih lanjut. Sampah hanya dibiarkan dan pada waktu tertentu ketika sudah menumpuk, sampah akan dibakar. Pembakaran sampah adalah salah satu metode pengelolaan sampah yang

mudah tetapi menyebabkan pencemaran udara (Faridawati, 2021). Karena hal tersebut sampah yang dipilih kemudian digunakan sebagai bahan daur ulang agar menjadi barang yang berguna. Tahap kedua dari kegiatan pengelolaan sampah ini adalah proses daur ulang sampah anorganik yaitu mendaur ulang botol plastik menjadi tabungan.

Daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali atau mengubah terhadap bahan dan barang-barang yang tidak lagi dianggap bernilai ekonomis. Pengolahan dalam daur ulang dilakukan melalui prosedur fisik, kimia, atau keduanya. Sehingga barang-barang yang tidak lagi dianggap dapat digunakan kembali atau diperdagangkan (Purwaningrum, 2016). Selain mengurangi penggunaan sampah anorganik, mendaur ulang sampah juga merupakan salah satu proses dalam pengelolaan sampah. Proses daur ulang ini sangat diperlukan karena sampah anorganik membutuhkan waktu yang lama untuk hancur dan bahkan ada sampah yang sulit untuk terurai. Contohnya adalah sampah plastik yang membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Jenis plastik yang tebal bahkan membutuhkan waktu sekitar 50-80 tahun untuk terurai (Daramita). Penggunaan botol plastik bekas dalam pembuatan tabungan, pot bunga dan lain sebagainya merupakan upaya mengurangi sampah botol minuman yang ada disekitar lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah, yakni dengan menggunakan prinsip empat (4R) untuk mengatasi masalah sampah adalah sebagai berikut:

1. *Reduce* (Mengurangi), yaitu berusaha meminimalkan penggunaan bahan atau barang;
2. *Reuse* (Menggunakan kembali), yaitu menggunakan bahan atau barang yang masih dapat digunakan kembali;
3. *Recycle* (Mendaur ulang), yaitu pemrosesan kembali barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan atau

- digunakan agar bermanfaat dan mempunyai nilai guna;
4. Replace (Mengganti), yaitu mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat digunakan berkali-kali. Ediana et al., (2018)

Pengelolaan sampah bahwa dalam perkembangannya, konsep bank sampah bertransformasi menjadi berbagai program dan kegiatan yang lebih aplikatif, diterima oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Salah satu pengembangan konsep 5R adalah gerakan pengurangan sampah melalui bank sampah. (Hertati, 2022). Bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang yang memiliki manfaat selain berupaya mengurangi jumlah sampah, juga memudahkan pengelolaan sampah dan memiliki nilai ekonomis bagi warga. Menurut bank sampah adalah pusat pengumpulan sampah dimana masyarakat sebagai nasabah menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Nasabah bank sampah mendapatkan buku tabungan sebagai catatan hasil tabungan yang disetorkan dan tertera nilai rupiah dari sampah yang telah di tabungnya. Nasabah dapat mengambil hasil tabungannya di bank sampah dalam bentuk Rupiah (uang).

Kita dapat menggunakan perspektif lensa sudut pandang 'pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan' untuk mengkaji bagaimana mengatasi masalah sampah kota-kota di negara berkembang (Wilson, 2013). Sejarah konsep dan istilah terkait ditinjau, dan *Integrated Sustainable Waste Management* (ISWM) secara jelas dibedakan dari pengelolaan sampah terpadu, yang sebagian besar digunakan dalam konteks integrasi teknologi di negara-negara maju. Sebaliknya, pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan mengkaji komponen fisik (pengumpulan, pembuangan, dan daur ulang) dan aspek tata kelola (inklusivitas pengguna dan penyedia layanan; keberlanjutan keuangan; lembaga yang koheren dan baik yang ditopang oleh kebijakan yang proaktif).

Bukti menunjukkan bahwa sistem yang efisien, efektif dan terjangkau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

lokal, dikembangkan dengan keterlibatan langsung dari penerima layanan. Terlepas dari tantangan yang masih ada, bukti ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dan sumber daya berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dapat dilakukan di negara-negara berkembang.

Collaborative Governance

Collaborative governance sebagai bentuk pengaturan pemerintahan dimana terdapat satu atau lebih agensi publik yang secara langsung mengikutsertakan stakeholders yang non-pemerintah dalam suatu proses pembuatan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, serta memiliki tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau untuk mengatur program publik atau aset (Ansell & Gash, 2007).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh (Ansell & Gash, 2007) yang menganggap collaborative governance sebagai, a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets. (Kallis, Kiparsky, & Norgaard, 2009) suggest that collaborative governance is an adaptive management to ensure the implementation and sustainability of a program.

Kemudian, siapakah yang dilibatkan? Secara konseptual, bahwa collaborative governance merupakan kemitraan tiga sektor yang didorong oleh campuran motif self-interest dengan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (Ansell & Gash, 2007). Ketiga sektor tersebut merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat (Rosenbloom, Kravchuck, & Clerkin, 2015).

(Agrawal & Lemos, 2007), Balogh dkk, (2011) dalam (Febrian, 2016) menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan implementasi dari adanya konsep "multipartner governance" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti halnya

kerjasama (Yunas & Nailufar, 2019). Meskipun segala hal dilakukan bersama, terdapat pembagian tersendiri dalam collaborative governance.

Berdasarkan pengertian dari (Donahue & Zeckhauser, 2011), collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent. Untuk menegaskan bahwa mereka memandang bahwa dalam kolaborasi, pemerintah menjadi regulator dan swasta menjadi pelaksananya.

Masih berkaitan dengan pernyataan di awal, (Ansell & Gash, 2007) berpendapat bahwa pada umumnya, collaborative governance muncul secara adaptif atau sengaja dibentuk karena adanya kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, konflik antar kelompok kepentingan yang laten dan hal tersebut sulit diselesaikan, serta upaya mencari cara baru untuk mendapat legitimasi dari sebuah kebijakan.

Untuk memperkuat pernyataan tersebut, (Cordery, 2004) berpendapat bahwa dalam collaborative governance terdapat keterlibatan dari berbagai pihak yang memiliki kebutuhannya masing-masing, tetapi bisa mewujudkan tujuan bersama tersebut pada waktu yang bersamaan.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa para stakeholders bukan hanya memberikan bantuan atas dasar keinginan membantu pemerintah yang merasa butuh, tetapi juga adanya keinginan untuk memasukkan kepentingan mereka dalam kebijakan yang akan ditetapkan. Namun, terlepas dari kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang terlibat,

Collaborative governance sebagai suatu ide baru dan inovasi dalam hal praktik yang menguatkan sektor publik, serta dorongan untuk melakukan proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa collaborative governance merupakan hasil dari keterbukaan dan pelibatan berbagai pihak di sekitar pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dalam kebijakan yang diimplementasikan terdapat kepentingan dari berbagai pihak tetapi mereka memiliki satu tujuan yang sama (Sorensen & Torfing, 2015).

Collaborative governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan collaborative governance muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesedian mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada terhadap setiap proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2007) (Sorensen & Torfing, 2015). "Defining Cooperation and Collaboration in the Context of Lean Construction" (Schottle, Haghsheno, & Gehbauer, 2014). Membandingkan faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sifatnya otonomi, kerjasama, dan kolaborasi. Kesimpulan akhir dijelaskan bahwa faktor kuat yang paling mempengaruhi terdiri dari kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama dalam mengambil risiko, sedangkan faktor yang lemah yakni munculnya potensi konflik, koordinasi, kontrol, bermitra, dan independent (Astuti, 2020).

1. Kesediaan Berkompromi. Dua pihak atau lebih, di mana masing-masing menginginkan sesuatu yang berbeda, akan selalu menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana masing-masing pihak meminimalkan konflik harus bersedia atau bisa berkompromi. Inti dari kolaborasi adalah manajemen konflik, yang berfokus pada menemukan kompromi yang akan membuat semua pihak merasa seolah-olah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan jika itu bukan apa yang mereka pikir mereka inginkan.
2. Komunikasi, Kolaborasi yang efektif tidak dapat terjadi tanpa dukungan komunikasi yang baik, dan kolaborasi yang sukses lebih dari sekadar membagi tugas tetapi lebih tentang menumbuhkan tekad tulus untuk mencapai tujuan bersama.

3. Komitmen, Unsur utama kesuksesan kolaboratif adalah komitmen. Dibutuhkan banyak komitmen untuk bisa berkolaborasi, tetapi jika dilakukan dengan benar, kolaborasi juga bisa menghasilkan komitmen bersama. Artinya, keberhasilan suatu kolaborasi akan naik-turun dengan tingkat komitmen yang dibawa oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.
4. Saling Percaya, Saling percaya atau kepercayaan harus jelas dalam hubungan yakni bagaimana pekerjaan dilakukan, bagaimana kata-kata diucapkan, dan bagaimana hasilnya diperhitungkan. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan berantakan dengan cepat dan, kadang-kadang, tidak dapat diperbaiki.
5. Transparansi/ Pertukaran Informasi, Transparansi/ pertukaran informasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam kolaborasi, akan meningkatkan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan sehingga kontrol terhadap para pemegang otoritas akan berjalan efektif.
6. Berbagi Pengetahuan, Berbagi pengetahuan dalam sebuah kolaborasi dapat membantu meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan. Kolaborasi akan mampu memberikan jawaban lebih cepat atau mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.
7. Kesediaan Mengambil Resiko, Dalam berkolaborasi, menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilaksanakan dengan melaksanakan observasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD), serta studi kepustakaan, Penelitian dan Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan secara berdampingan serta saling melengkapi satu sama lain.

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan PPM Ilmu Administrasi Publik di Desa Cileuni Kulon, Kecamatan Cileuni, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tahap ke-1 ini adalah dengan melakukan kegiatan FGD, pendampingan penyusunan *roadmap* dan rencana aksi pengelolaan sampah Desa. Strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu perencanaan, kelambagaan dan penguatan kapasitas (Buchari, 2020).

Sasaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah unsur dari perangkat desa, Dusun (8 Dusun), Rukun Warga (26 RW) dan Bumdes Pengelola Sampah serta Utusan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Desa Cileuni Kulon. Target peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini minimal berjumlah 54 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam 3 tahap kegiatan, yaitu:

1. Persiapan awal, terdiri atas survei awal dan *Focus Group Discussion* (FGD), dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai realita pengelolaan sampah di Desa yang sudah berjalan selama ini dan menggali informasi mengenai kendala atau hambatan yang dialami oleh perangkat desa, Dusun dan Bumdes Pengelola Sampah serta Utusan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di lingkungan Desa dalam pengelolaan sampah tersebut. Informasi hasil FGD ini akan dijadikan sebagai bahan dalam menentukan perumusan strategi pemecahan masalah secara inklusif dan dapat membangun kesepakatan Bersama diantara seluruh peserta, serta

- menuangkannya dalam bentuk rancangan *roadmap* dan rencana aksi.
2. Implementasi penyusunan draft *roadmap* dan rencana aksi strategi pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Berbasis Collaborative Governance dan SDG's (Oleh Tim PPM UNPAD).
 3. Evaluasi akhir, dilakukan untuk memberikan rekomendasi akhir kepada para perangkat desa, Dusun dan Bumdes Pengelola Sampah, Utusan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Desa mengenai Evaluasi dan Penyempurnaan Model Collaborative Governance pengelolaan sampah berbasis SDG's di Desa Cileunyi Kulon, Kab. Bandung dan memperoleh feedback atas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

HASIL

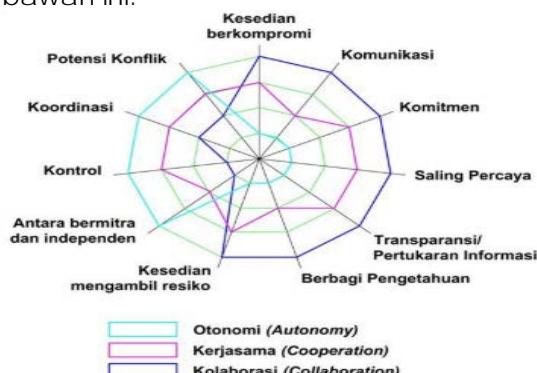
Kegiatan yang telah Tim PPM adalah observasi awal dan analisis sementara terhadap pengelolaan sampah eksisting di Desa Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kab Bandung. Observasi awal dan proses analisis temuan sementara dilaksanakan selama bulan September. Observasi awal ini dilakukan untuk memperoleh data, menetapkan permasalahan, serta penetapan strategi pemecahan permasalahan di lapangan. Observasi awal yang dilakukan adalah pertama kali adalah mengidentifikasi aktivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa serta masyarakat Desa Cileunyi Kulon. Hasil observasi mengindikasikan bahwa :

1. Pemerintah Desa Cileunyi Kulon masih mengandalkan mekanisme pembuangan sampah yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, berupa pengangkutan sampah berkala (1 minggu sekali) dengan menggunakan truk sampah.
2. Sering didapatkan penduduk menumpuk sampah di depan rumah, bahkan sering membuang sampah pada tempat yang tidak seharusnya.

Bagi yang memiliki lahan dan kebun, biasanya penduduk melakukan tindakan pembakaran sampah secara mandiri. Hal ini mengakibatkan polusi udara. Pembakaran sampah secara sembarangan serta tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan pelanggaran terhadap UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Pasal 29 ayat 1 huruf g menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dan setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketetapan Perda yang berlaku.

3. Pemerintah Desa Cileunyi Kulon pada dasarnya telah berupaya untuk mebangun sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri yang dioperasionalkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Bumdes ini menaungi 8 bank sampah yang tersebar di Desa Cileunyi Kulon, dengan lingkup kerja pada 8 dusun dan 26 Rukun Warga (RW). Namun pada tahun 2023, Pemerintah Desa Cileunyi Kulon menyatakan hanya bertahan 4 Bank Sampah yang dapat bertahan. Harapan dari Pemerintah Desa Cileunyi Kulon adalah dengan PPM ini diharapkan PPM ini dapat membantu menghidupkan kembali bank sampah-bank sampah tersebut untuk mewujudkan Desa Cileunyi Kulon menjadi desa yang zero waste.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon dengan berbasis pada konsep Collaborative Governance perlu menggambarkannya dengan gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kompromi Jangka Panjang dalam Bentuk Otonomi, Kerjasama dan Kolaborasi Schottle, Haghsheno dan Gehbauer (2014), "Defining Cooperation and Collaboration in the Context of Lean Construction".

Faktor kuat yang paling mempengaruhi kolaborasi terdiri dari kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama dalam mengambil risiko. Dalam proses pemerintahan kolaboratif tahap pertama ini adalah:

1. Berkompromi Dua pihak atau lebih,

Berkompromi dalam pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon dimana masing-masing menginginkan sesuatu yang berbeda, akan selalu menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana masing-masing pihak meminimalkan konflik harus bersedia atau bisa berkompromi. Inti dari kolaborasi adalah manajemen konflik, yang berfokus pada menemukan kompromi yang akan membuat semua pihak merasa seolah-olah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan jika itu bukan apa yang mereka pikir mereka inginkan.

Mengidentifikasi mengenai cakupan area pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon dan pembahasan peluang adanya keterlibatan masyarakat atau pihak swasta guna sukses menangani masalah sampah di wilayah Jawa Barat tersebut. Kompromi terjadi ketika ada dua hal yang berbeda, lalu dilakukan tindakan untuk mengatasi perbedaan cara kerja, kultur gaya kerja individu, norma dan nilai organisasi yang dibawa oleh masing-masing organisasi yang melakukan kolaborasi untuk menemukan gaya kerja, norma, cara kerja bersama. Kompromi menjadi penting dalam pengelolaan sampah karena masyarakat berasal dari RW yang berbeda-beda. Jika tidak ada pemahaman dalam cara kerja antar masyarakat untuk pengelolaan sampah akan berdampak pada kacaunya alur kolaborasi yang teralin. Oleh karena itu kompromi sangat dibutuhkan. Kompromi dapat dilakukan melalui rapat-rapat ataupun brainstorming baik formal maupun non-formal yang harus dilakukan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat terkait.

Dalam pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon perlunya rasa saling menghargai antar sesama masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah di lingkungannya. Rasa saling menghargai dapat terlihat dari sikap profesional yang ditunjukkan oleh seluruh pengurus dalam pengelolaan sampah baik itu masyarakat sendiri yang terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon. Meskipun bersikap profesional tetapi tidak mengurangi intensitas komunikasi menjadi berkurang karena setiap ada permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pengurus pengelolaan sampah di lingkungan terkait disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) pada hari Jum'at 17 November 2023 Penyampaian permasalahan menjadi hal yang penting karena seluruh peserta Forum Group Discussion (FGD) pengelolaan sampah harus mengetahui sejauh mana pengurus lingkungan wilayah Desa Cileunyi Kulon bekerja dan apabila terdapat permasalahan organisasi lainnya dapat menerima dan mencarikan solusinya. Contoh untuk pengelolaan sampah yang ada di Jalan Galumpit Desa Cileunyi ketika banyak oknum yang membuang sampah sembarangan karena area yang banyak dilalui masyarakat dari berbagai daerah, dan menjadi permasalahan dikarenakan Desa Cileunyi Kulon tidak memiliki TPS maka dengan cara mengatasi sampah tersebut dengan dibakar, dengan pernyataan dibakar dalam mengatasi sampah menjadi perdebatan dalam FGD dengan Pengurus Pengelolaan Sampah yang Berada di wilayah RW 22.

2. Komunikasi

Kolaborasi yang efektif tidak dapat terjadi tanpa dukungan komunikasi yang baik, dan kolaborasi yang sukses lebih dari sekadar membagi tugas tetapi lebih tentang menumbuhkan tekad tulus untuk mencapai tujuan bersama. pada kegiatan FGD komunikasi tersebut dapat dilakukan sudah optimal. Dimana aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi diikutsertakan dan aktif menyampaikan pandangannya pada FGD atau pertemuan yang dilakukan seperti Komunikasi yang dilakukan oleh aktor terkait pengelolaan sampah di Desa

Cileunyi Kulon pelaporannya dilakukan dengan berbagai media komunikasi. Setiap petugas dari masing-masing lingkungan RW terkait sudah memberikan informasi agar dapat ditindaklanjuti ketika ada sampah yang menumpuk di Desa Cileunyi pada RW 06 sejak tahun 2021 dalam pengelolaannya sampah yang menumpuk dengan cara menggunakan pembakaran hawu/suluh (tungku pembakaran dan kayu) dengan 2 ember galon 25 kg yang dibakar tanpa mengeluarkan asap dan sampah habis terbakar dibawah setengah jam.

Permasalahan Pengelolaan sampah yang berada di Desa Cileunyi Kulon belum ada kejelasan terhadap lahan untuk membuang sampah sejak 2017 karena wilayah yang digunakan untuk pembuangan sampah di Desa Cileunyi Kulon pemilik lahannya adalah Jasamarga, keadaan yang berada di lingkungan RW dekat jalan Tol Cileunyi pada saat melakukan FGD ditemukan kendala kendala banyak oknum yang membuang sampah sembarangan dan akhirnya menjadi menumpuk di antara batas jalan dengan jalan tol dengan adanya permasalahan sampah yang menumpuk maka pengurus pengelolaan sampah yang terdekat ada di lokasi untuk mengatasi permasalahan sampah.

Dengan ini informasi dan komunikasi tersebut dapat dilakukan sudah optimal. Dimana peneliti menemukan bahwa mayoritas aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi diikutsertakan dan aktif menyampaikan pandangannya pada FGD atau pertemuan yang dilakukan dapat disimpulkan pada tahap pertama ini konsep pemerintahan kolaboratif mulai tercermin dalam proses pelibatan aktor non pemerintah dalam mengidentifikasi hambatan yang akan dihadapi pada proses tata kelola pemerintahan.

3. Komitmen

Unsur utama kesuksesan kolaboratif adalah komitmen. Dibutuhkan banyak komitmen untuk bisa berkolaborasi, tetapi jika dilakukan dengan benar, kolaborasi juga bisa menghasilkan komitmen bersama. Artinya, keberhasilan suatu kolaborasi akan naik-turun dengan tingkat komitmen yang dibawa oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Keberlangsungan kolaborasi dalam pengelolaan sampah dapat terus berkelanjutan. Hasil yang didapat adalah kolaborasi yang ada sekarang harus berlanjut selama masalah sampah masih ada. Diperkuat dari pernyataan Kepala Desa Cileunyi Kulon saat kegiatan FGD berlangsung kolaborasi ini harus dilanjutkan. Bahkan akan ditingkatkan. Mudah-mudahan ada ilustrasi lain dari masyarakat yang kita harapkan untuk menjadi pionir untuk pengelolaan sampah khususnya di Desa Cileunyi Kulon.

Mengingat Desa Cileunyi Kulon dalam Pengelolaan sampah mendapatkan apresiasi Kades peduli sampah dari Bupati Kabupaten Bandung pada tahun 2018 dengan pengelolaan sampah secara mandiri dan membuat kegiatan bank sampah di Desa Cileunyi Kulon. Pengelolaan sampah melalui kegiatan Bank sampah memiliki manfaat dalam perspektif lingkungan. Melalui Kegiatan Bank Sampah masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sampah yang berarti hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sampah. Keberadaan Bank Sampah tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan namun juga dapat meningkatkan sirkulasi ekonomi.

Pada fakta saat melakukan FGD di Desa Cileunyi Kulon Pengelolaan sampah Sesuai data yang diperoleh dilapangan, untuk pertemuan FGD (Focus Group Discussion) adanya pembentukan organisasi dan pengadministrasian di Desa Cileunyi Kulon. Organisasi pengelolaan sampah di Cileunyi Kulon terbentuk pada tahun 2017 lalu yang memiliki 26 kelompok, setiap kelompok pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon terdiri dari 1 RW dengan jumlah RW yang ada di Cileunyi Kulon yaitu 26 RW, setiap RW mempunyai kelompok pengelolaan sampah bentuk nyata dari pengelolaan sampah di tiap RW masing-masing memiliki Bank sampah dan mendapatkan bantuan berupa gerobak sampah dan motor roda sampah. Pengelolaan sampah yang ada di Desa Cileunyi Kulon menjadi konsen dikarenakan di Desa Cileunyi Kulon tidak Adanya TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dengan adanya pembentukan kelompok organisasi pengelolaan sampah yang berada di RW masing-masing berkomitmen untuk melakukan Kerjasama dengan beberapa

pihak dalam pelatihan pengelolaan sampah.

4. Saling Percaya

Dalam berjalannya pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon terdapat kesetaraan atau keseimbangan yang menjadi prinsip agar partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. pada prinsipnya juga perlu diketahui apakah masing-masing aktor memiliki kewajiban sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya dan terciptanya hubungan yang setara atau seimbang. Terjalinnya dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Desa Cileunyi Kulon terdapat hubungan yang saling menghormati, menghargai serta saling percaya antar aktor yang bermitra yaitu Pengurus Pengelolaan Sampah Di Desa Cileunyi sekaligus nasabah Bank Sampah. Dengan adanya rasa saling percaya membuktikan bahwa hubungan kerjasama ini dapat menggambarkan keseimbangan dimana rasa saling percaya dibutuhkan selain itu antar aktor juga saling menghargai dan menghormati sehingga dalam pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon terus berjalan dengan baik.

Saling percaya dalam pengelolaan sampah yang ada di Desa Cileunyi Kulon dengan mengadakan pertemuan baik formal maupun informal yang penting pertemuan tersebut dapat memberikan ruang bagi para anggota atau pihak-pihak yang melakukan kolaborasi untuk saling berinteraksi dan merasa saling terhubung satu sama lain. memberikan kesempatan yang sama dari setiap pengurus dan pemerintah Desa Cileunyi Kulon untuk mengemukakan ide-ide dan cara pandang mereka terhadap suatu hal yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah. Sehingga setiap anggota merasa terlibat dalam pengelolaan sampah.

Dalam berkolaborasi harus ada pembagian tugas dan rasa percaya antar organisasi pengurus pengelolaan sampah yang berkolaborasi. Tanpa adanya rasa percaya sulit untuk antar organisasi pengurus pengelolaan sampah untuk

mengelola sampah. Kepercayaan dalam kolaborasi tidak dapat dipisahkan. Kepercayaan dibutuhkan mengingat seluruh anggota kolaborasi berasal dari latar belakang organisasi yang berbeda-beda. Kepercayaan yang dijalin akan semakin baik apabila dilakukan komunikasi secara intensif oleh seluruh unsur yang terkait dalam pengelolaan sampah. Mempercayai organisasi lain pun sangat diperlukan. Kepercayaan juga diperlukan untuk menekan rasa superioritas lembaga pemerintah yang cenderung mendominasi arah kebijakan. Sehingga masyarakat dapat dengan nyaman untuk berkolaborasi dengan pihak pemerintah Desa Cileunyi Kulon dalam pengelolaan sampah.

5. Transparansi/ Pertukaran Informasi

Transparansi/ pertukaran informasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam kolaborasi, akan meningkatkan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan sehingga kontrol terhadap para pemegang otoritas akan berjalan efektif.

Terkait dengan pengelolaan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat desa, telah diupayakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu keputusan desa strategis menyangkut perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. BUMDes tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menjadi nilai guna untuk masyarakat desa. Salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Bandung yaitu di BUMDes Baitul Amanah yang ada di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi. BUMDes ini mengelola usaha atau potensi yang ada di Desa diantaranya yaitu bank sampah di 13 RW, sekaligus pembagian alat bank sampah yang seluruh anggarannya dari APBDes mencapai lebih dari seratus juta. Ada komposter, timbangan digital, buku tabungan nasabah, buku rekapitulasi bank sampah dan buku registrasi nasabah.

Pada pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon pada Kp Galumpit RT 01 RW 06 membangun (TPSS) Tempat Pembuangan Sampah Sementara salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Desa Cileunyi Kulon dengan dibangun sejak tahun 2015 dan 2023 dengan gambar di bawah ini



Gambar 1 TPSS Kp Galumpit RT 01 RW 06 pada Tahun 2015 (Sumber: Youtube Desa Cileunyi Kulon)



Gambar 2. TPSS Kp Galumpit RT 01 RW 06 2023 Desa Cileunyi Kulon. (Sumber: Youtube Desa Cileunyi Kulon)

Dengan perkembangan waktu makin tingginya volume sampah di Desa Cileunyi Kulon Khususnya di Kp. Galumpit RT 01 RW 06 dengan merenovasi dan membuat kapasitas pembangunan TPSS menjadi luas sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi.

6. Berbagi Pengetahuan

Berbagi pengetahuan dalam sebuah kolaborasi dapat membantu meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan. Kolaborasi akan mampu memberikan jawaban lebih cepat atau mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh penggerak tim RW 22 dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan berbasis kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan lingkungan RW 22 Desa Cileunyi kulon ini dengan beberapa program bank sampah yang sudah berjalan sampai saat ini dengan jumlah nasabah hampir mencapai 300 nasabah dan pendaur ulangan sampah plastik hasil dari pemilahan sampah yang ada di bank sampah yang selanjutnya akan dibuat kerajinan yang bernilai jual dan pembuatan kerajinan dari limbah rumah tangga seperti minyak jelantah, tepung kadaluarsa. Bahkan dalam pengelolaan sampah di RW 22 sudah menggunakan maggot dalam penguraian sampah organik dan sampah basah.

Pengelolaan sampah di RW 25 fokus pada pengelolaan sampah organik. Pengelolaan sampah organik merupakan salah satu program pengumpulan sampah organik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu dengan program LCO (Lubang Cerdas Organik) guna untuk menampung sampah organik. Selain LCO (Lubang Cerdas Organik) yang merupakan program langsung pemerintah Kabupaten Bandung, RW 25 memiliki sistem pengolahan sampah organik rumah maggot.

Maggot adalah Belatung yang merupakan tahapan dari larva serangga *Hermetia illucens* atau biasa dikenal dengan nama lalat BSF (*Black Soldier Fly*). Belatung Maggot Berbeda dengan belatung biasa yang merupakan larva lalat yang dapat menimbulkan penyakit. Belatung Maggot berperan sebagai pengurai bahan organik dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga belatung Maggot tidak hanya memanfaatkan sampah organik tetapi juga dapat meningkatkan kesuburan Tanah. RW 25 pun sudah mendapatkan produk dari

bank sampah non organiknya yang berupa rumah maggot, rumah Maggot yang menghasilkan pupuk organic dan mengeluarkan pupuk cair. Pengelolaan sampah di RW 25 juga memanfaatkan sampah non organic lainnya dengan pembakaran sampah-sampah plastik yang dicetak sehingga membentuk paving block dan batu bata.

7. Kesediaan Mengambil Resiko Dalam berkolaborasi,

Menghadapi resiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan. Pada konteks kolaborasi ini, pihak PPM Unpad mengadakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan di Desa Cileunyi Kulon. Tim PPM Unpad Mengundang Pemerintahan Desa dan mengundang beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat dan pihak yang terlibat dengan masalah pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon untuk melakukan musyawarah.

Gambar 3. Pelaksanaan FGD di Desa Cileunyi Kulon.

Pada pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon saat ini melalui FGD mengalami hambatan dalam pengelolaan sampah, dengan jumlah bank sampah yang ada di Desa Cileunyi Kulon hanya memiliki 4 bank sampah yang berada di Desa Cileunyi Kulon. Hal ini menjadi masalah dalam pengelolaan sampah yang menjadi sorotan dalam kesadaran masyarakat peduli terhadap sampah mengenai adanya status darurat sampah Bandung Raya ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan berakhir pada 25 September 2023. Namun ternyata Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan memperpanjang status

tersebut hingga 25 Oktober 2023 dikarenakan belum tuntasnya penanganan overload sampah dan penanganan kebakaran sampah di TPA Sarimukti. Berdasarkan hasil FGD yang terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat dan kelompok pengelolaan sampah di setiap RW sebagai bentuk dialog antar stakeholder dari pernyataan informasi bahwa skala pertemuan yang dilakukan untuk terbentuknya Roadmap dan Rencana Aksi Strategi Pengelolaan Sampah di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Berbasis Collaborative Governance dan SDG's.

FGD ini menghasilkan kesadaran diantara peserta FGD bahwa ternyata pada dasarnya masing-masing perwakilan RW dan Bank Sampah telah memiliki wawasan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah mandiri. Namun beberapa faktor yang menjadi kendala utama dalam merealisasikan zero waste di Desa Cileunyi Kulon adalah Keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk bank sampah. Peserta FGD menyampaikan bahwa sangatlah sulit untuk ketersediaan bank sampah di lingkungan masing-masing. Kendala utama adalah protes dari warga sekitar bank sampah yang mengeluhkan polusi udara dan kebersihan lingkungan yang terjadi.

Contoh konkret adalah bank sampah yang berada di dekat komplek Taman Cileunyi. Bank sampah tersebut memanfaatkan tanah pinjaman dari PT. Jasa Marga (Jalan tol Padaleunyi). Aspek positif dari bank sampah ini adalah karena pada dasarnya bank sampah ini telah bersifat collaborative, yakni melibatkan berbagai stakeholder dilingkungannya untuk berkolaborasi dalam bank sampah. Bank sampah tersebut kerap mendapat protes dari warga komplek Taman Cileunyi karena polusi dan tumpukan sampah yang ada di bank sampah. Karena sering mendapatkan protes, maka bank sampah pun berhenti beroperasi.

Namun imbas berhentinya operasional bank sampah tidak menghentikan warga membuang sampah di bekas bank sampah tersebut. Pembuangan sampah terus berlanjut dilakukan oleh warga, dan sampah menjadi

semakin menumpuk. Berkaitan dengan penyediaan lahan ini pihak Pemerintah Desa Cileunyi Kulon menyatakan bahwa anggaran desa tidak dapat digunakan untuk penyediaan lahan bank sampah, karena secara regulasi tidak memungkinkan.

Permasalahan yang kemudian disadari dan dicoba untuk dipecahkan peserta FGD adalah bagaimana untuk mempertahankan komitmen mengembangkan bank sampah dan merealisasikan program zero waste di Desa Cileunyi Kulon. Peserta FGD menyadari bahwa ternyata yang paling sulit adalah mempertahankan komitmen untuk mencapai tujuan. Karena ilmu dan keterampilan pengolahan sampah sudah dimiliki peserta berkat pelatihan-pelatihan pengolahan sampah yang pernah diikuti. Hal ini kemudian menjadi perhatian dan permintaan dari peserta dan pihak Pemerintah Desa Cileunyi Kulon, agar bagaimana terobosan dalam bentuk rekayasa sosial yang dapat mempertahankan komitmen stakeholder pengelolaan sampah Desa Cileunyi Kulon dalam kerangka kolaborasi atau *collaborative governance*.

PENUTUP

Realitas Pengelolaan sampah di daerah Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kab Bandung Barat) pada bulan Agustus 2023 yang mengalami kondisi darurat ditandai dengan *overload Tempat Pembuangan Akhir (TPA)* sampah Sarimukti yang sudah tidak sanggup lagi menampung pembuangan sampah. Sampah tersebut terutama sampah yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Berdasarkan hal tersebut maka tim PPM merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam menjadi bagian dalam solusi mengatasi sampah dari hulunya.

Berdasarkan hal tersebut maka Tim PPM memutuskan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah pada level Desa di wilayah Kab. Bandung. Adapun desa yang Tim PPM pilih untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah Desa Cileunyi Kulon, yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Setelah melaksanakan kegiatan PPM ini, maka PPM telah menghasilkan terbentuknya terbukanya komunikasi dan transparansi informasi terkait permasalahan di wilayah masing-masing peserta, serta terbentuknya komitmen untuk menyusun rencana aksi lebih lanjut untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon. Pemerintah Desa menyatakan akan menyiapkan suatu program rekayasa sosial berbasis kolaborasi (*collaborative governance*) dan penguatan tata kelola pengendalian sampah yang akan dilaksanakan pada program kerja tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., & Lemos, M. C. (2007). A Greener Revolution in the Making? Environmental Governance in the 21st Century. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 49, 36-45. doi:<https://doi.org/10.3200/ENVT.49.5.36-45>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007, November 13). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571. doi: [10.1093/jopart/mum032](https://doi.org/10.1093/jopart/mum032)
- Astuti, R. S. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. . Semarang: In T.D. Press (Ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Aulia, D. C. (2021). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jerapah. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskesmas)*, 62-70.
- Bandung, D. (2023, September 8). *Masih Masa Darurat Sampah, Masyarakat Kota Bandung Wajib Olah Sampah*. Diambil kembali dari PortalJabarProv.Go.id: <https://jabarprov.go.id/berita/masih-masa-darurat-sampah->

- masyarakat-kota-bandung-wajib-olah-sampah-10391
- Buchari, R. A. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut. *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.24198/sawala.v1i1.25836>
- Cordery, J. L. (2004, December). Another Case of The Emperor's New Clotches? *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 77(4). doi:DOI:10.1348/0963179042596432
- Daramita, M. (t.thn.). Pengembangan Modul Pengolahan Sampah Plastik Berbasis Proyek pada Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA Universitas Medan (UNIMED). *Doctoral Dissertation*.
- Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative Governance : Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. Princeton University Press.
- Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7spt3>
- Ediana, D. F. (2018). Analisis Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (3R) Pada Masyarakat di Kota Payakumbuh. *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 238-246.
- Faridawati, D. &. (2021). Pengetahuan Masyarakat tentang Dampak Pembakaran Terhadap Lingkungan Kabupaten Jember. *Jurnal Sanitasi Lingkungan*, 1(2), 50-55.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *WEDANA (Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi)*, 11(1), 200-208. Diambil kembali dari <https://core.ac.uk/download/pdf/322502631.pdf>
- Hertati, D. &. (2022). Collaborative Governance in The Management of a Waste Bank. 1-13. doi:<https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10923>
- Kallis, G., Kiparsky, M., & Norgaard, R. B. (2009, October). Collaborative Governance and Adaptive Management: Lessons from California's CALFED Water Program. *Environmental Science & Policy*, 631-643. doi:DOI:10.1016/j.envsci.2009.07.002
- Mulasari, A. H. (2016). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia (KEMAS)*, 11(2), 98-106. doi:<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3521>
- Pamungkas, W. W. (2023, Oktober 26). Bisnis.com. Dipetik 12 30, 2023, dari <https://bandung.bisnis.com/read/20231026/549/1708173/alasan-dlh-jabar-kenapa-status-darurat-sampah-bandung-raya-dicabut>
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan. *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 8(2), 141-147.
- Ripaldi, D. (2023, Agustus 27). *Bandung Raya Darurat Sampah, 95 Persen TPS Kota Bandung Overload*. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/regional/read/5380906/bandung-raya-darurat-sampah-95-persen-tps-kota-bandung-overload>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuck, R. S., & Clerkin, R. M. (2015). *Public Administration : Understanding Management, politics and Law in The Public Sector*. New York: McGraw-Hill Education.
- Sahil, J. A. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. *Jurnal Bioedukasi*, 4(2), 478-487.

doi:<https://doi.org/10.33387/bioedu.v4i2.160>

Schottle, A., Haghsheno, S., & Gebauer, F. (2014, June). Defining Cooperation and Collaboration in the Context of Lean Construction. *Teaching Lean Construction , Proceedings IGCL-22*, 1269-1280.

Siagian, T. S. (2022). Pelatihan Manajemen Bank Sampah Guna Pelestarian Lingkungan dan Meningkatkan Nilai Ekonomis Masyarakat di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Abdi Mas Adzkia*, 2(2), 99-107.

Sorensen, E., & Torfing, J. (2015). Enhancing Public Innovation through Collaboration, Leadership and New Public Governance. Dalam *New Frontiers in Social Innovation Research* (hal. 145-169). doi:DOI:10.1057/9781137506801_8

Wilson, D. C. (2013). Integrated Sustainable Waste Management in Developing Countries. *Proceeding of institution of Civil Engineers : Waste and Resource Management*, 52-68. doi:<https://doi.org/10.1680/warm.12.00005>.

Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program Kampung KB di Kabupaten Jombang. *Cosmogov (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 5(2). doi:<https://doi.org/10.24198/cosmo.gov.v5i2.21814>